



BERI CONTOH: Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan bersama Kepala Kantor Perwakilan BI DIY, Sri Darmadi Suditoyo, saat melakukan scan qris pembayaran PBB P2 dalam Pekan Panutan Pembayaran PBB-P2 di Graha Pandawa Balaikota Yogyakarta, kemarin (4/6).

# Baru Menyentuh 15,67 Persen

Pemkot Putar Otak Kejar Target PBB-P2 Rp 140,4 Miliar

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* – Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Yogyakarta Tahun 2026 tampaknya harus dipacu lebih kencang lagi. Bagaimana tidak, mendekati pertengahan tahun, kantong Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini baru terisi sebesar Rp 22,01 miliar, alias

mandek di angka 15,67 persen dari target yang dipatok sebesar Rp 140,4 miliar.

Melihat sisa target yang masih menganga lebar, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta langsung mengambil langkah taktis. Bertepatan dengan momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Pemkot Yogyakarta, sebuah jurus stimulan digelar melalui Pekan Panutan Pembayaran PBB-P2 di Graha Pandawa Balaikota Yogyakarta, Kamis (4/6).

Demi memancing minat wajib pajak agar segera menyetorkan kewajibannya, Pemkot Yogyakarta

menebar insentif berupa potongan langsung alias diskon 5 persen. Syaratnya ketat: warga harus melunasi PBB-P2 tepat di hari pelaksanaan acara.

Pantauan di lokasi, strategi "diskon satu hari" itu cukup ampuh menyedot animo masyarakat. Sedikitnya 690 Nomor Objek Pajak (NOP) menyerbu mejalayanan. Menariknya, mayoritas warga memilih jalur kilat nontunai, memanfaatkan gewai mereka untuk bertransaksi via QRIS maupun aplikasi Yogyakarta Smart Service (JSS).

■ Baca BARU... Hal II



Jika masyarakat membayar lebih awal, tentu sangat menguntungkan. Ada stimulus diskon 5 persen yang meringankan beban warga, dan di sisi lain, pemerintah bisa langsung tancap gas melakukan perencanaan pembangunan dari dana yang terkumpul."

Wawan Harmawan  
Wakil Wali Kota Yogyakarta

# Baru Menyentuh 15,67 Persen

sambungan dari hal Joglo Jogja

Kepala Bidang Pembukuan, Penagihan, dan Pengembangan Pendapatan Daerah BPKAD Kota Yogyakarta, Putut Purawandono membenarkan bahwa realisasi 15,67 persen tersebut merupakan data pamungkas per 25 Mei 2026. Angka itu dinilai masih jauh dari ideal mengingat potensi riil di lapangan sangat besar.

"Tahun ini kami menerbitkan 97.801 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dengan nilai ketetapan total mencapai Rp 167,77 miliar. Sementara target riil yang harus masuk kas daerah adalah Rp 140,4 miliar. Maka dari itu, program potongan 5 persen ini khusus kami berikan untuk transaksi 4 Juni 2026 dari pukul 00.00 hingga 23.59 WIB sebagai stimulan akselerasi," beber Putut.

Tak sekadar menggelar seremoni di Balai Kota, BPKAD

kini tengah menyiapkan skema gerilya untuk mengejar sisa target. Putut menyebut pihaknya bakal mengoptimalkan operasional Mobil Keliling Pajak SI-JAK hingga menggelar Pekan Pembayaran PBB-P2 Nontunai langsung di level RW.

"Kami juga meminta warga proaktif memperbarui data objek dan subjek pajaknya agar ke depan ketetapan nilai pajak ini jauh lebih akurat dan tepat sasaran," tambahnya.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Harmawan, mengakui tantangan memompa PAD di tengah situasi ekonomi saat ini tidaklah mudah. Ia memotret adanya kecenderungan dari para pelaku usaha dan investor yang masih menahan diri (*wait and see*) untuk menanamkan modal baru di Kota Gudeg.

"Kalau untuk investasi baru

memang posisinya masih menahan diri. Tapi untungnya, aktivitas rutin masyarakat dan dinamika dunia usaha lokal kita masih berputar dengan baik," tutur Wawan.

Oleh karena itu, percepatan pembayaran pajak di awal waktu dinilai menjadi kunci vital agar roda pembangunan kota tidak tersendat. Wawan optimistis, meski realisasi saat ini masih minim, integrasi sistem pembayaran digital akan mampu mendongkrak angka capai target hingga akhir tahun.

"Jika masyarakat membayar lebih awal, tentu sangat menguntungkan. Ada stimulus diskon 5 persen yang meringankan beban warga, dan di sisi lain, pemerintah bisa langsung tancap gas melakukan perencanaan pembangunan dari dana yang terkumpul," tegasnya. (eri/bid/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Wakil Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 05 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005